

**PERANAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI  
KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI  
KABUPATEN BONE**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial  
Pada Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**IRHAMSYAH**

**NIM. 503001131013**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRHAMSYAH  
NIM : 50300113013  
Tempat/Tgl. Lahir : Soppeng/25 November 1995  
Jurusan/Prodi : PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Alamat : Jalan Mustafa Dg Bunga (Beroanging)  
Judul : Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Oktober 2017

Penulis,

**IRHAMSYAH**

NIM: 50300113013

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone", yang disusun oleh Irhamsyah, Nim: 50300113013, mahasiswa Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat 10 November 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial.

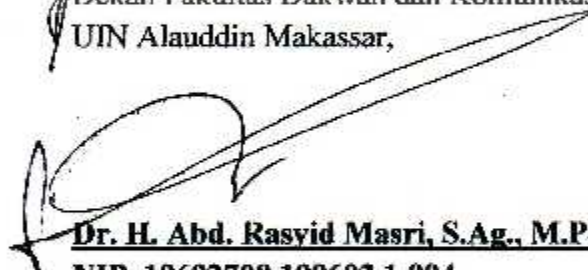
Samata-Gowa, 08 Januari 2018

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dra. St. Aisyah BM.,M.Sos.I
Sekretaris	: Dr. Sakaruddin.,S.Sos.,M.Si
Pembimbing I	: Dr. H. Mahmuddin.,M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Syamsuddin AB.,S.Ag.,M.Pd
Munaqisy I	: Dr. H. Baharuddin Ali.,M.Ag
Munaqisy II	: Drs. H. Syakhrudin DN.,M.Si



Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar,



**Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., MM**  
NIP. 19692708 199603 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعَالَمِيْنَ, وَبِهٖ نَسْتَعِيْنُ عَلٰى اُمُوْر الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ, وَصَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلٰى  
اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ...

Tiada ucapan yang patut dan pantas diucapkan atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone”**, kecuali ucapan syukur Kepada Allah SWT., karena Dia-lah sumber kenikmatan dan sumber kebahagiaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW., yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, bimbingan serta dorongan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M., Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

3. Wakil Dekan I Dr. H. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag., Wakil Dekan II Dr. H. Mahmuddin, M.Ag., Wakil Dekan III Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I., dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
4. Dra. St. Aisyah. BM., M.Sos.I., Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Syamsuddin. AB., S.Ag., M.Pd., Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag., Pembimbing I, yang dengan sabar membimbing penulis dan memberikan motivasi sehingga kritikan dan saran dapat penulis terima dengan baik sehingga penulis bisa merampungkan skripsi ini.
7. Dr. Syamsuddin. AB., S.Ag., Pembimbing II yang selalu sabar membantu dan membimbing penulis sehingga penulis mampu menyerap ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. H. Baharuddin ALi I, M.Ag. serta Drs. H. Syakhrudin DN., M.Si, Penguji II yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Muh. Quraissy Mathar., S.Sos.,M.Hum., Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan seluruh stafnya.

10. Bapak Jawahere, S.P., Ketua Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali, yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan.
  11. Bapak Amirdin, S.Pt., M.Si., Kepala Kelurahan Mampotu beserta Warga Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan.
  12. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2013 (Bunglon)., terkhusus kepada Irsan Suandi, Muh.riskar, Alif Nugraha, Nur Ikhsan, dan Samsul Alil Bahril sahabatku yang telah membantu dan memotivasi penulis.
  13. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Kerukunan Mahasiswa Bone (KMB) Lapareppa yang telah memberikan motivasi penulis.
- Orang tua tercinta Ayahanda Arifin dan Ibunda Nurtang, serta saudaraku Irfan, Irmalasari dan Irsal Aiman ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, semangat, dukungan dan perhatiannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu demi kesempurnaan kritik dan saran yang sifatnya

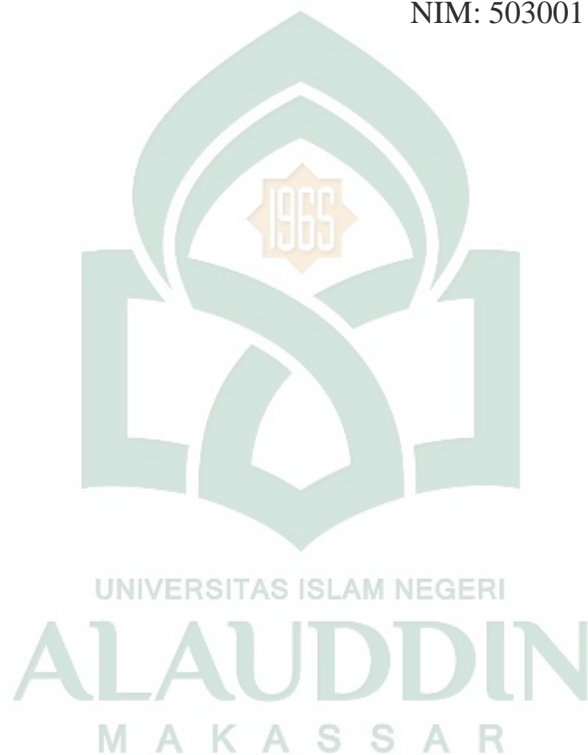
membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Samata-Gowa, 22 Agustus 2017

Penulis,

**IRHAMSYAH**

NIM: 50300113013





## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-12</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>13-33</b>
A. Tinjauan Tentang Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dan Kesejahteraan Petani.....	13
B. Pandangan Islam Tentang Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dan Kesejahteraan Sosial .....	30
C. Kerangka Konseptual.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38-43</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian .....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	41
G. Pengujian Kabsah Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45-66</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Peranan Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.....	52
C. Keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone .....	59
D. Penunjang Dan Penghambat Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone .....	61



<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68-60</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Implikasi.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT PENULIS</b>	



## Abstrak

**Nama : Irhamsyah**  
**NIM : 50300113013**  
**Judul : Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa submasalah yaitu: Pertama, bagaimana keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Kedua, bagaimana pengaruh Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Ketiga, apa faktor penunjang dan penghambat Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu. Pertama, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Sebagai Motivator atau Pendorong. Kedua, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai pendidik. Ketiga, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai Fasilitator. Keempat, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai Agen Perubahan. Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu, sangat terlibat dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu, karena Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) tentu saja tidak sepatutnya untuk mengharapkan “peranan yang menentukan”. Sedangkan, faktor penunjang, Faktor penunjang atau pendukung Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang utama yaitu kebijaksanaan dari pemerintah berupa program maupun bantuan-bantuan modal misalkan dana PUAP, faktor penghambat, yaitu Kurangnya Tenaga penyuluh dan Penyaluran prasarana pertanian mengalami Keterlambatan.

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu: (1). Diperlukan keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam rangka peningkatan kapasitas petani yang ada di Kelurahan Mampotu agar hasil pertanian dapat lebih banyak dan lebih menjanjikan. (2). Perlunya pemahaman dari petani dan pihak Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) yang ada di Kecamatan terhadap peningkatan kesadaran bagi petani dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Kelurahan Mampotu.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat, karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, maka pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Artinya bahwa sektor pertanian memegang peran penting dan seharusnya menjadi penggerak dari kegiatan perekonomian. Berdasarkan data BPS 2014, penduduk yang bekerja di sektor pertanian berjumlah sekitar 38,973,033 orang atau 40 persen dari total penduduk usia produktif, sedangkan sisanya sebanyak 60 persen tersebar diberbagai sektor diluar pertanian. Sektor pertanian sendiri dalam penerapannya terbagi dalam berbagai macam sub sektor.<sup>1</sup> Di Indonesia sektor pertanian terbagi menjadi lima, yaitu Pertama sub sektor tanaman pangan, Kedua sub sektor perkebunan, Ketiga sub sektor hortikultural, Keempat sub sektor peternakan, dan Kelima adalah sub sektor perikanan.

Pembangunan pertanian Indonesia telah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan harapan dapat meningkatkan produksi pertanian semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dalam mencapai

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Lapangan Pekerjaan Utama Rakyat Indonesia 2013 –2014*, (Jakarta: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2013 dan 2014).

kesejahteraan, Peningkatan produksi pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan arah dan tujuan pembangunan pertanian

Pertanian merupakan sektor primer yang mendominasi aktivitas perekonomian di Indonesia. Luasnya lahan pertanian dengan tanah yang subur membuat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai seorang petani. Namun, taraf hidup sebagian petani di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu, Peranan Dinas Pertanian sangat besar dalam mensejahterakan para petani di pelosok-pelosok desa maupun di Kelurahan.

Disisi lain, pertanian menjadi pusat perhatian pemerintah sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Terlepas dari kepercayaan masyarakat petani terhadap usaha pertanian dan kebijakan pemerintah, ternyata dilain pihak berbagai persoalan banyak menimpah petani. Bentuk permasalahan tersebut seperti masalah akses terhadap air, tanah, benih, iklim, dan jaminan terhadap harga produk konflik agraria, serta budaya yang impor juga menjadi permasalahan dalam usaha pertanian termasuk persoalan yang

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press 1995), h. 32.

lahir sebelum adanya Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) seperti sulitnya akses terhadap air, kesulitan untuk mendapat benih dan pupuk, serta tidak bisa mengakses alat-alat pertanian yang lebih canggih sehingga masyarakat mengalami kerugian, hal ini terjadi sebelum adanya Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK).<sup>3</sup> Akhirnya meskipun kebijakan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat melalui pertanian telah diluncurkan, faktanya masih banyak ditemui masyarakat miskin yang penghasilan pertanian rendah. Masyarakat miskin pada dasarnya adalah golongan masyarakat yang jumlah pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum meliputi bahan makanan, pakaian, dan perumahan. Keterbatasan tersebut selanjutnya menyebabkan golongan masyarakat belum dapat hidup secara layak sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut tentunya sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat bersangkutan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaannya harus terus dilakukan oleh pemerintah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kepercayaan diri bagi Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) melakukan pembinaan, pelaksanaan dan kerja teknis pada masyarakat terutama pada masyarakat petani.

Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan. Sesuai dengan amanat

---

<sup>3</sup> Buku pintar Pengolahan Data dan Informasi Pertanian di BPK, H. 5

<sup>4</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 173.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU No.16/2006 SP3K), kebijakan pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah (a) mengutamakan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan (b) memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian melalui pemberian prioritas insentif pembiayaan. Strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkatan wilayah administrasi pemerintahan;<sup>5</sup>.

Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal bagi petani yang meliputi kegiatan dalam ahli pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh kepada petani dan keluarganya yang berlangsung melalui proses belajar mengajar. Penyuluh pertanian harus ahli pertanian yang berkompeten, disamping bisa membimbing para petani, penyuluh juga memberikan motivasi, memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran petani sehingga dapat mendorong minat belajar mereka dalam menghadapi permasalahan dilapangan.<sup>6</sup>

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 16 tahu 2006, Kementerian Pertanian mengambil kebijakan menjadikan BPK/BP3K sebagai pusat koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan yang berbasis berupa kawasan komoditi unggulan dan atau wilayah. Selain itu, BPK/BP3K

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pertanian.

<sup>6</sup> Mardikanto, *Sistem Penyuluhan Pertanian*, (Cet. II; Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), h. 467.

merupakan pusat data dan informasi bagi petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan usaha di wilayah kecamatan.

Pengelolaan pada Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone merupakan salah satu upaya yang diarahkan agar dari pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani . Dengan dukungan yang baik dari Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani akan hidup semakin layak dan makmur. Perlu peran aktif dari setiap bagian di dalam Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya mengenai Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

### **2. Deskripsi Fokus**

Deskripsi fokus adalah deskripsi mengenai penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara umum terhadap apa yang akan diteliti pada penelitian tersebut, adapun deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu:

#### **a. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)**

Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Badan



Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan. Jadi keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam peningkatan ekonomi petani sangat menentukan keberhasilan petani dalam mencapai kesejahteraannya.

b. Kesejahteraan Sosial

Istilah kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan adalah orang yang sejahtera yaitu orang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tentram. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.<sup>7</sup>

c. Petani

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Petani dapat jga di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Jadi, Secara umum

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( KBBI ) h. 1284.

pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan.<sup>8</sup>

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone?. Adapun sub masalahnya yaitu :

1. Bagaimana aktivitas Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone?
2. Bagaimana keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone?
3. Apa faktor penunjang dan penghambat Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone?

### ***D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu***

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Penelitian ini

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( KBBI ) h. 1447.

dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan. Pembahasan mengenai Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, penulis hanya menemukan yang hampir sama dengan judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Irmayanti Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul *“Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Tani (Studi Kasus Kelompok Tani Cisadane Para Petani Sawah Lingkungan Talamangape Kelurahan Raya Kabupaten Maros)”* tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk intervensi penyuluh pertanian kepada kelompok tani Cisadane dalam upaya memberdayakan kehidupan Sosial Ekonomi petani sawah dan mengetahui perubahan kehidupan Sosial Ekonomi setelah adanya penyuluhan pertanian kelompok tani Cisadane yang terjadi pada petani sawah di Lingkungan Talamangape, Kel. Raya, Kab. Maros.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

---

<sup>9</sup> Skripsi Irmayanti, *Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Tani (Studi Kasus Kelompok Tani Cisadane Para Petani Sawah Lingkungan Talamangape Kelurahan Raya Kabupaten Maros)*, (Universitas Hasanuddin, 2013), h. 13.

2. Jurnal Sunarti Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Mulawarman yang berjudul “*Peranan Dinas Pertanian (DIPERTA) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sebatik timur Kabupaten Nunukan*”, tahun 2015.

Adapun fokus penelitiannya ini yaitu Peningkatan kesejahteraan petani; meliputi: Pelaksanaan kegiatan usaha tani, Peningkatan produktivitas usaha tani, Peningkatan pendapatan usaha tani.<sup>10</sup> Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

3. Skripsi Wahyu Sugianto Jurusan Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas lampung yang berjudul “*Peran Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) dalam Peningkatan Swasembada Beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah*” tahun 2016.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Penelitian yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi karena pada penelitian ini bersangkut paut dalam hidup bermasyarakat baik mengenai jalinan unsur-unsur yang pokok seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-

---

<sup>10</sup> Jurnal Sunarti, *Peranan Dinas Pertanian (DIPERTA) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sebatik timur Kabupaten Nunukan*, (Universitas Mulawarman, 2015), h. 191.

lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan sosial maupun pengaruh timbal balik antara segi kehidupan bersama.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksana penelitian dan mengungkapkan masalah yang di kemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka dikemukakan tujuan kegunaan penelitian.

#### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan sebagai berikut.

a) Untuk mengetahui aktivitas Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

b) Untuk Mengetahui keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

c) Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

#### **2. Kegunaan penelitian**

##### **a) Kegunaan teoritis**

Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain :

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi semua kalangan dan memberi gambaran pengetahuan terhadap Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, sehingga diharapkan mampu untuk mencapai kinerja yang maksimal.

1) Menambah wawasan berpikir tentang bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan/ kelurahan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

2) Bagi *background* sosial, khususnya jurusan PMI-Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi dalam pengembangatn ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai Peranan Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

b) Kegunaan praktis

Penelitian diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Dengan demikian penelitian ini dapat berguana bagi kalangan-kalangan seperti :

1) Bagi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada Petugas Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu Kecamatan

Amali Kabupaten Bone sehingga dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing.

2) Bagi penulis. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terhadap sesuai atau tidaknya teori Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) yang terjadi di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupateb Bone.

3) Bagi Masyarakat. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terkhusus berprofesi sebagai petani bahwa petugas Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) telah terdidik dan terlatih dalam menangani permasalahan pertanian.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Tinjauan Tentang Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan Kesejahteraan Petani*

##### **1. Pengertian Peranan**

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) : (1). Berperan sebagai, (2). Melakukan tindakan atau bertindak dengan giat, (3). Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan adalah suatu kompleks harapan manusia terhadap individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.<sup>1</sup>

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.<sup>2</sup>

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( KBBI ) h. 898.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. ( Jakarta: Rajawali Press, 2002), h 221.

lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.<sup>3</sup>

## **2. Pengertian Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)**

Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan. Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU No.16/2006 SP3K), kebijakan pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah (a) mengutamakan prinsip kemitraan

---

<sup>3</sup> Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 51.

dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan (b) memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian melalui pemberian prioritas insentif pembiayaan. Strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.<sup>4</sup>

Sebagai penjabaran dari UU No 16/2006, Kementerian Pertanian mengambil kebijakan menjadikan BPK/BP3K sebagai pusat koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan yang berbasis berupa kawasan komoditi unggulan dan atau wilayah. Selain itu, BPK/BP3K merupakan pusat data dan informasi bagi petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan usaha di wilayah kecamatan.

### **3. Tujuan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)**

Tujuan Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (*better farming*), berusaha tani lebih menguntungkan (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*) dan lingkungan lebih sehat. Penyuluhan pertanian dituntut agar mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan petani-nelayan, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian, serta mendampingi petani untuk: (1) Membantu menganalisis situasi-situasi yang sedang mereka hadapi dan melakukan perkiraan ke depan; (2)

---

<sup>4</sup> Buku Pintar Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian di BPK, h. 2.

Membantu mereka menemukan masalah; (3) Membantu mereka memperoleh pengetahuan/informasi guna memecahkan masalah; (4) Membantu mereka mengambil keputusan, dan (5) Membantu mereka menghitung besarnya risiko atas keputusan yang diambilnya.<sup>5</sup>

Penyuluhan pertanian merupakan salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan program perkembangan pertanian. Kegiatan penyuluhan pertanian bertujuan meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, melalui peningkatan produksi pertanian. Sistem penyuluhan pertanian adalah rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta perubahan sikap bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian. Pembangunan Pertanian bertujuan meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kualitas konsumsi gizi, mendorong terciptanya lapangan kerja, dan kesempatan berusaha serta mendorong peningkatan pertumbuhan industri pertanian melalui pengembangan agribisnis yang berkelanjutan.<sup>6</sup>

#### **4. Cara mencapai tujuan**

Upaya mencapai itu semua diperlukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang baik, selanjutnya dibutuhkan kelembagaan, ketenagaan yang kompeten, mekanisme dan tata kerja yang jelas termasuk supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan pembiayaan yang memadai. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) sebagai wujud revitalisasi

---

<sup>5</sup> Buku Pintar Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian di BPK, h.8.

<sup>6</sup> Buku Pintar Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian di BPK h. 1.

penyuluhan pertanian, telah mengatur penyelenggaraan penyuluhan yang baik. Untuk implementasi UU SP3K tersebut menghendaki kearifan lokal dari otonomi daerah.<sup>7</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk di dalamnya penyuluhan pertanian. Dengan semakin meningkatnya pendidikan pertanian, banyaknya informasi dari berbagai media massa, adanya Alsintan baru serta perbaikan usaha tani. Perbaikan usaha tani tersebut telah meningkatkan terjadinya perubahan usaha tani dari semula bersifat subsistem menjadi usaha tani yang bersifat komersial.

Agar Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dapat berjalan secara produktif, efektif, dan efisien, maka perlu dilakukan identifikasi sumber daya dan program-program pembangunan pertanian, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian sekarang menghadapi berbagai tantangan baik berupa lingkungan ekonomi nasional maupun era globalisasi yang terus bergerak dinamis. Programa penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dan perikanan merupakan rencana yang disusun secara sistematis memuat tentang penjabaran aspirasi kebutuhan petani di Desa dan program pemerintah kecamatan guna memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali tercapainya tujuan penyuluhan tahun berikutnya dengan

---

<sup>7</sup> [Http://bpppataruman.blogspot.com/2013/09/balai-penyuluhan-pertanian.html](http://bpppataruman.blogspot.com/2013/09/balai-penyuluhan-pertanian.html) (Disper 5 Sep 2013).

memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkat dan cakupan pengorganisasian pengelolaan sumber daya yang ada sebagai pelaksana penyuluhan<sup>8</sup>

## **5. Tugas dan Fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)**

### **a. Tugas**

Balai Penyuluh Kecamatan mempunyai tugas:

- 1) Memfasilitasi penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/ kota;
  - 2) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan kecamatan;
  - 3) Menyediakan akses terhadap penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar;
  - 4) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan
- 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran di BPK/BP3K secara berkelanjutan; dan;
  - 6) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

---

<sup>8</sup> Buku Program Balai Penyuluhan Kecamatan(BPK) h.2.

b. Fungsi

Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, petani/pelaku utama, dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas BPK/BP3K.<sup>9</sup>

**6. Program kegiatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)**

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian;
- b. Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan penyuluhan;
- c. Pemberdayaan Kelembagaan Petani;
- d. Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan;
- e. Peningkatan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan.<sup>10</sup>

**7. Definisi Kesejahteraan Sosial**

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap manusia, bahkan orang rela bekerja keras dengan tujuan utamanya adalah ingin sejahtera serta memiliki kehidupan yang layak agar terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu; a). Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan relasi-relasi

---

<sup>9</sup> Winny Dian Wibawa, M. Sc., *Podoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)*, (Jakarta: Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2014), h. 4-5.

<sup>10</sup> Buku Pintar Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian di BPK, h.11.



sosial yang harmonis dengan lingkungan hidupnya. b). Unyuk mencapai penyusuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.<sup>11</sup> Sebagaimana kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam undang-undang no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1.

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”<sup>12</sup>

Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Lee dan Hanna (1990) mendefenisikan kesejahteraan sebagai total dari *net worth* (manfaat yang benar-benar diperoleh) dan *human capital wealth* (kesejahteraan sumber daya manusia). Manfaat yang diperoleh merupakan nilai atas *aset* yang dimiliki dikurang pengeluaran (*liabilitas*). Sedangkan kesejahteraan SDM (*human capital income*) yang ada saat ini, atau dihitung dari nilai pendapatan non *aset*. Sajogyo (1984) mendefenisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan

---

<sup>11</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: LIPI Press, 2005) h. 10.

<sup>12</sup> Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1.

jalur pemerataan dalam Trilogi Pembangunan sejak Repelita III yaitu: (1) peluang berusaha, (2) peluang bekerja, (3) tingkat pendekatan, (4) tingkat pangan, sandang, perumahan, (5) tingkat pendidikan dan kesehatan, (6) peran serta, (7) pemerataan antar daerah atau desa/kota, dan (8) kesamaan dalam hukum.<sup>13</sup>

Menurut Syarief dan Hartoyo (1993), faktor kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh:

#### 1. Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan yang dialami oleh keluarga akan menghambat upaya peningkatan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga, yang pada gilirannya akan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah kemiskinan saling berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi. Strategi pembangunan ekonomi yang tidak semata-mata ditujukan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu menciptakan kondisi yang baik dalam mengatasi masalah kemiskinan.

#### 2. Faktor Budaya

Kualitas kesejahteraan keluarga ditandai oleh adanya kemantapan budaya yang dicerminkan dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kemantapan budaya ini dimaksudkan untuk menetralsir akibat dari adanya pengaruh budaya luar. Adanya kemantapan budaya diharapkan akan mampu memperkokoh keluarga dalam melaksanakan fungsinya.

---

<sup>13</sup> Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 46.

### 3. Faktor Teknologi

Peningkatan kesejahteraan keluarga juga harus didukung oleh pengembangan teknologi. Keberadaan teknologi dalam proses produksi diakui telah mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Penguasaan teknologi ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pemilikan modal.

### 4. Faktor Keamanan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ditentukan pula oleh adanya stabilitas keamanan yang terjamin. Hal ini dimaksudkan agar program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan hasil-hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

### 5. Faktor Kehidupan Agama

Kesejahteraan keluarga akan menyangkut masalah kesejahteraan spiritual, seperti ketakwaan. Oleh karenanya, program peningkatan kesejahteraan keluarga harus didukung oleh kehidupan beragama yang baik. setiap keluarga diberi hak untuk dapat mempelajari dan menjalankan syariat agamanya masing-masing dengan tanpa memaksakan agama dengan yang satu kepada agama yang lainnya. Sehingga pemahaman keagamaan dan pelaksanaan syariat akan mampu meningkatkan kesejahteraan spiritual.

---

<sup>14</sup> Agus Sjaafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, h. 47

## 6. Faktor Kepastian Hukum

Peningkatan kesejahteraan keluarga juga menuntut adanya jaminan atau kepastian hukum. Sebagai contoh: suatu keluarga akan mampu mengusahakan lahannya dengan baik, kalau kepastian akan hak milik lahan tersebut terjamin. Kepastian hukum atas berlakunya peraturan upah minimum yang diterima oleh pekerja pabrik hal ini akan memperbesar kemungkinan pekerja atau keluarga dapat meningkatkan kesejahteraannya.<sup>15</sup>

Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *flatform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan

---

<sup>15</sup> Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, h. 48

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa;

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa. Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.<sup>16</sup>

## 8. Sistem Pelayanan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai sistem pelayanan sosial menitikberatkan pada pemberisn pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. berdasarkan definisi kesejahteraan sosial dalam sudut pandang pelayanan sosial tersebut, ada tiga hal yang termaksud yaitu:

- a. Konsep pelayanan sosial, yaitu semua aktivitas yang sangat luas, mulai dari perundang-undangan sosial sampai kepada tindakan langsung pemberian bantuan
- b. Konsep “kesejahteraan sosial” berbeda dengan “kesejahteraan”. Terpenuhinya kebutuhan sosial (kesejahteraan sebagai suatu keadaan) menjadi dasar bagi terciptanya “kesejahteraan” (sebagai keadaan yang baik dalam semua aspek kehidupan manusia).
- c. Pada tingkat masyarakat, kesejahteraan sosial berarti terdapatnya ketertiban sosial (*social order*) yang lebih baik.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995

<sup>17</sup> Syamsuddin AB., *Benang-benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*, (Cat. 1, Jawa Timur : Wade 2017), h. 5.

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterkan masyarakatnya.<sup>18</sup> Salah satunya melalui penyelenggaraan pelayanan sosial, pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan di lembaga-lembaga pada umumnya dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

### **9. Kosep Perubahan Sosial**

Perubahan sosial adalah perubahan pola prilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu . Perubahan sosial menunjuk pada perubahan fenomena sosial, baik individu maupun kelompok, pada struktur maupun proses sosial, pada hakikatnya dapat dipelajari, baik itu tentang sebab-sebab terjadinya, bagaimana proses perubahan itu terjadi, maupun pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh perubahan sosial tersebut. Perubahan sistem masyarakat menjadi masyarakat terbuka serta berubahnya tatanan dunia baru menuju era globalisasi ,menyebabkan berubahnya paradigma pembangunan pada negara-negara berkembang. Terjadi pergeseran fungsi birokrasi (*reinventing the*

---

<sup>18</sup> Hardiansyah, *Komunikasi Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi* (Cet, 1, 2015), h. 15

government), “dimana pemerintah yang tadinya menjadi pelaku utama pembangunan (provider), berubah fungsinya menjadi fasilitator pembangunan (*enabler*) atau yang disebut dengan pemerintahan katalis (Osborne dan Gaebler, 1996: 24).<sup>19</sup>

Perubahan ini merupakan peluang dalam menumbuhkan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui pendekatan ini pengelolaan sumber daya produktif tidak dirancang dan dikelola secara terpusat, melainkan oleh warga setempat sesuai dengan masalah, kebutuhan, dan kondisi daerahnya. Prinsip dasarnya adalah kontrol atas suatu tindakan harus dipegang oleh mereka yang akan menanggung akibat tindakan tersebut. Perubahan sosial dalam pemberdayaan komunitas pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan evolusioner yang disengaja (*intended change*) dan terarah (*directional change*).<sup>20</sup>

Dalam kehidupan manusia sehari-hari kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya bagi mereka yang tergolong miskin karena mereka sendirilah yang merasakan dan menjalani kehidupan dalam kemiskinan tersebut. Munculnya kemiskinan ditandai oleh berbagai faktor keterbatasan yang mengakibatkan rendahnya kualitas kehidupan, seperti rendahnya penghasilan, terbatasnya kepemilikan rumah tinggal yang layak huni, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Program pemberdayaan masyarakat miskin dirumuskan dan dilaksanakan

---

<sup>19</sup> Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Cet.1, Jakarta: Prenada Media Group, 2010).h. 29.

<sup>20</sup> Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 35.



dengan Bottom up, dimana pada pelaksanaan kegiatan dilapangan berdasarkan inisiatif masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Dari faktor inilah maka Pemerintah berinisiatif membentuk Kelompok Tani yang diberi pengawasan atau intervensi langsung oleh penyuluh pertanian dalam memberdayakan Sosial Ekonomi petani, diharapkan agar usaha dan pendapatan Petani semakin meningkat. Dari intervensi penyuluh pertanian ini terdapat program-program penyuluhan yang diberikan kepada para anggota kelompok tani, untuk meningkatkan hasil produksi padi mulai dari pemilihan bibit unggul, jarak tanam, pemilihan pupuk, penyemprotan pestisida, dll. dari penyuluhan pertanian ini, diharapkan partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan ikut serta dalam kegiatan program kerja dan mendukung jalannya program kerja ini. maka hasil yang dicapai nantinya bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkan.<sup>21</sup>

## **10. Konsep Petani**

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran

---

<sup>21</sup> Sunarti, dkk., Masyarakat Petani, Mata Pencapaian Sambilan dan Kesempatan kerja di Kelurahan Cakung Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990.

hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.<sup>22</sup>

Arti dari pertanian adalah kegiatan kemanusiaan mengusahakan tanah dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hasil hewan, tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah tersebut untuk mendatangkan hasil selanjutnya.<sup>23</sup> Dalam artian ini, orang yang melakukan usaha baik itu dengan tanaman ataupun ternak itu adalah dengan tujuan tertentu untuk dapat menyelenggarakan hidupnya sepanjang masa, turun-temurun, setidaknya bukan untuk satu dua tahun saja. Tahun berikutnya ia sekeluarga harus menyelenggarakan hidup, anak harus dibesarkan, dan sebagainya. Mungkin kebutuhannya akan semakin bertambah.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, setidaknya petani harus mampu memperoleh dari usahanya itu penghasilan yang tidak kurang dari yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Usahatani Tani merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih dan pestisida) dengan efektif, efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat.<sup>24</sup> Tanah yang dikerjakan tersebut dipergunakan dalam kegiatan usaha

---

<sup>22</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/pertanian>, 18 Oktober 2011.

<sup>23</sup> Anwas Adiwilaga, *Ilmu Usaha Tani*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1975), h. 2.

<sup>24</sup> Abdul Rahim & Diah Retno Dwi Hastuti, *Ekonomika Pertanian* (Pengantar Teori dan Kasus), (Jakarta: Penebar Swadaya 2007), h. 158.

untuk mendatangkan hasil yang diharapkan. Secara tegas, kemampuan tanah tersebut tidak dapat berkurang dengan kata lain kemampuan tanah tersebut harus tetap.<sup>25</sup>

Terdapat beberapa istilah petani secara antropologis dalam Bahasa Inggris yang semuanya seolah-olah bermakna petani namun masing-masing memiliki perbedaan yang jelas. Istilah-istilah tersebut antara lain: *peasant*, *tribe*, *farmer/agricultural entrepreneur*. *Peasant* bermakna kaum tani pedesaan, yaitu orang yang bercocok tanam dan beternak di daerah pedesaan, tidak di dalam ruang-ruang tertutup (*green house*). *Peasant* tidak melakukan usaha dalam arti ekonomi, ia mengelolah sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis. *Farmer* atau pengusaha pertanian (*agricultural entrepreneur*) merupakan sebuah perusahaan yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang dibeli di pasar untuk memperoleh laba dengan menjual hasil produksinya secara menguntungkan di pasar hasil bumi. *Tribe* (petani primitif) petani yang bagian terbesar dari hasil produksi dimaksudkan untuk digunakan oleh penghasilan-penghasilannya sendiri atau untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kekerabatan, dan bukan untuk dipertukarkan dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>26</sup>

Di Indonesia, kebanyakan petani kecil yang sebagian besar hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau subsisten, sehingga lebih sesuai disebut dengan “*peasant*”. Mereka mengedepankan semboyan “*safety first*” atau

---

<sup>25</sup> Prasetya N, Yuli, *Marginalisasi Petani dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian*, (Yogyakarta: UGM, 2011), h. 18.

<sup>26</sup> Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2007), h. 80

dahulukan selamat.<sup>27</sup> Kemiskinan identik dengan petani kecil, ciri-ciri petani kecil antara lain: memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, berpendidikan rendah, bermodal lemah, dan kurang responsif terhadap inovasi baru.<sup>28</sup> Persoalan lain petani di Indonesia harus mengusahakan usaha tani di lingkungan tropika yang penuh resiko misalnya, banyak hama, tidak menentunya curah hujan, para petani harus lebih berhati-hati dalam menerima inovasi karena kegagalan berarti penderitaan bagi seluruh keluarga.

Hal tersebut menjadikan petani dalam posisi yang dilematis dimana untuk dapat *survive* petani harus berani mengambil resiko dalam berinovasi, namun jika inovasi ini gagal mereka harus siap menanggung sendiri akibatnya.<sup>29</sup>

## ***B. Pandangan Islam Tentang Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Dan Kesejahteraan Sosial***

### **1. Pandangan Islam tentang Penyuluhan Kecamatan (BPK)**

Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) telah memberikan sumbangan pada pencapaian berbagai program pembangunan, walaupun ada anggapan seolah-olah dilaksanakan dengan pendekatan dipaksa, terpaksa, dan biasa. Namun dengan berkembangnya zaman petani dan keluarganya mengelola usaha taninya dengan penuh kesadaran dan mampu melakukan pilihan-pilihan yang tepat dari alternatif

---

<sup>27</sup> Warsana, SP, *Strategi Melakukan Penyuluhan Pertanian untuk Petani “Kecil”*, <http://www.google.com/url?q=http://www.litbang.deptan.go.id/artikel/one/202/pdf/Strategi%2520>, 20, Agustus, 2017.

<sup>28</sup> Karwan A Salikin, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 93.

<sup>29</sup> Loekman Sutrisno, *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Kanisius 2002), h. 5.

yang ada. Oleh karena itu paradigma baru penyuluhan pertanian menuntut agar penyuluhan pertanian difokuskan kembali kepada petani-nelayan dan keluarganya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Untuk menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian terkait dengan moralitas agama, yaitu adanya kesamaan antara penyuluhan dan dakwah, bahwa pentingnya profesionalisme penyuluhan dari tinjauan Islam.

Kegiatan penyuluhan dan dakwah memiliki tujuan merangkul sebanyak mungkin umat sesuai dengan ajaran Allah pada Nabi Muhammad SAW agar menyeru ummat manusia ke jalan-Nya. dalam menyeru ummat manusia ke jalan Allah itu, Nabi beserta para pengikutnya bersandar pada keterangan-keterangan yang jelas ( basyirah )dan sambil memuji kesucian Allah.<sup>30</sup> Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.<sup>31</sup>

Ayat ini menunjukkan cara-cara yang baik untuk mengajak hamba-hamba Allah ke jalan-Nya, dan tidak sedikitpun konotasi bahwa dianjurkan lewat paksaan.

<sup>30</sup> [sulse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?...penyuluhan...islam...](http://sulse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?...penyuluhan...islam...) 7 Des 2012

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h, 281.

Oleh karena itu diharapkan bahwa penyuluhan pertanian mengikuti metode dakwah yang sesuai dengan ajaran Allah SWT, sehingga mampu menciptakan kerelaan orang atau sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.

## 2. Pandangan Islam tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial pada intinya adalah terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi: pangan (makanan) sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana transportasi, informasi dan telekomunikasi. Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi, hiburan. Kesejahteraan dilukiskan antara lain dalam firman Allah surah Thâhâ ayat 117-119, yang berbunyi:

فَقُلْنَا يَتَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

“Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".<sup>32</sup>

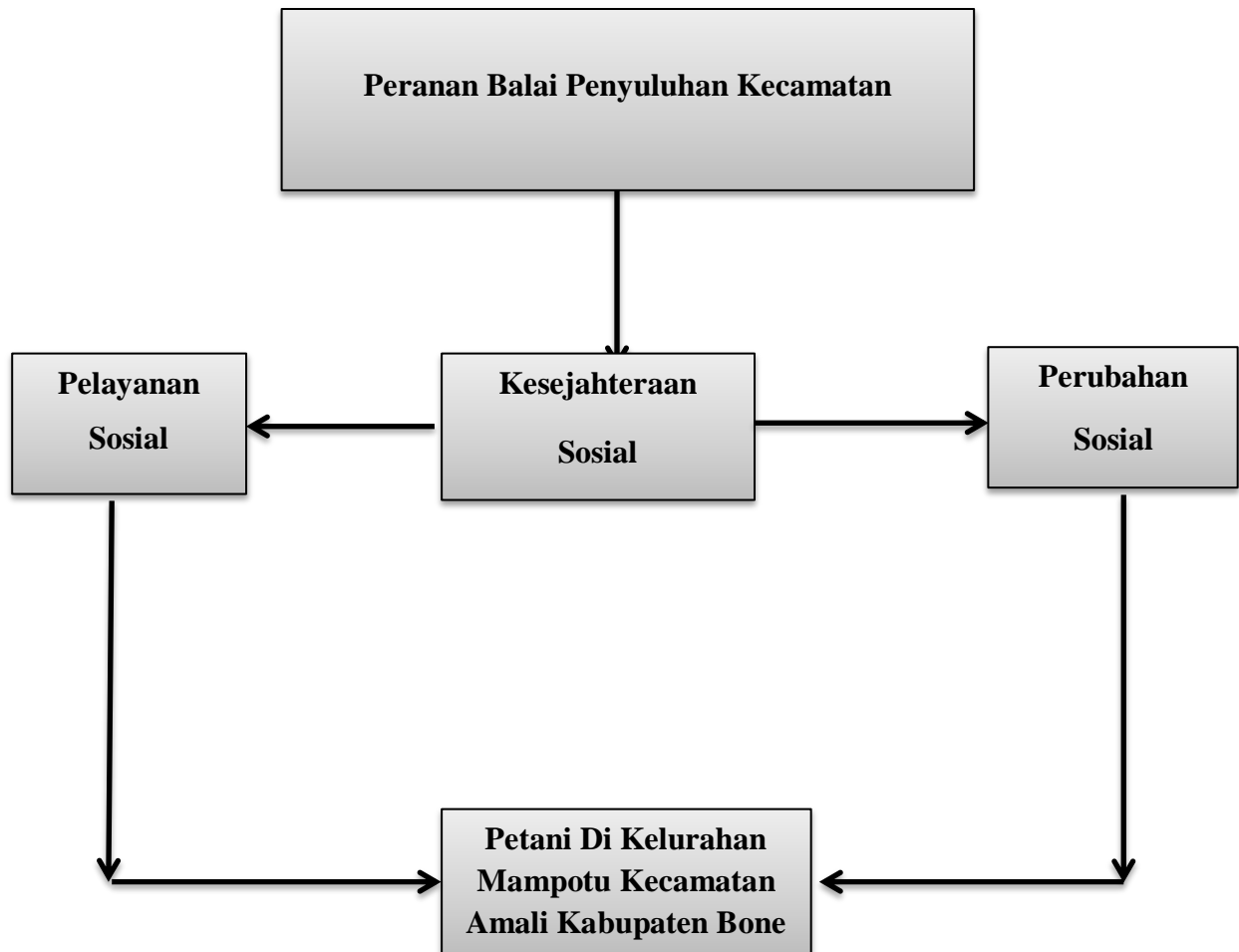
Dari ayat menurut ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 320.

terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

*C. Kerangka Konseptual*



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Setiap penelitian ilmiah harus memiliki metode yang tepat. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan data yang objektif, dengan menggunakan metode pengumpulan data dan teknis analisis data yang akurat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan usaha mencari hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Di dalam penelitian kualitatif selalu menekankan pada tiga aspek penting. Pertama, pada unit analisis mikro di mana satuan yang diteliti di batasi sedemikian rupa sehingga lebih dapat dijelaskan secara terperinci. Kedua, penelitian bersifat holistik dalam arti melihat obyek yang diteliti secara menyeluruh di dalam satu kesatuan. Ketiga, penelitian kualitatif cenderung menekankan perbandingan sebagai salah satu kekuatan karena perbandingan ini juga membuat penelitian kualitatif dapat menekankan proses dan dapat menegaskan konteks sosial di mana suatu gejala itu muncul.<sup>1</sup>

Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoretis yang kuat

---

<sup>1</sup> Syamsuddin AB., *Paradigma Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Makassar: Shofia, 2016 ) h. 11.



sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. Penelitian kualitatif deskriptif dibagi dalam dua hal. pertama, penelitian kualitatif deskriptif “*unmeaning*” hanya untuk memaparkan bagian permukaan dari sebuah realitas empiris. Kedua, penelitian kualitatif deskriptif “*meaningfull*” yakni penelitian deskriptif yang selain mengungkap permukaan luar dari sebuah realitas sosial, tapi juga hingga bagian dalam.<sup>2</sup>

Dengan demikian, maka penulis memilih metode penelitian kualitatif sebagai metode yang tepat agar dapat mendalami Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

## 2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi objek penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Penulis melakukan penelitian di Kelurahan tersebut karena dari informasi masyarakat, bahwa banyak yang merasa Petugas Balai Penyuluh Kecamatan kurang adil dalam pengalokasian bantuan pertanian, karena banyak dari mereka yang merasa pantas menerima bantuan pertanian tapi tidak diberikan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sarannya. Pendekatan ialah disiplin

---

<sup>2</sup> Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif*. (Jakarta Selatan: GP Press Group, 2013), h 29-30.

ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi.

Sosiologi berasal dari paduan *morphem* (bentuk kata) *socios* (latin) dan *logos* (yunani). *Socios* artinya kawan *logos* artinya berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai hal-hal berkawan (masyarakat). Secara umum sosiologi dapat diartikan sebagai Ilmu yang membicarakan hal-hal yang ada sangkut pautnya dalam hidup bermasyarakat baik mengenai jalinan unsur-unsur yang pokok seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan sosial maupun pengaruh timbal balik antara segi kehidupan bersama.<sup>3</sup>

### **C. Sumber Data**

1. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Data ini akan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa beberapa informan diantaranya:

- a) Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Amali;
- b) Petugas Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Amali;
- 1. Penyuluh Pertanian;

---

<sup>3</sup> Dr. Syamsuddin, AB, S. Ag., M. Ag. *Sosiologi Dakwah*, h. 2.

## 2. Ketua Kelompok Tani.

- c) Masyarakat (Petani);
- d) Kepala Kelurahan Mampotu.

2. Data Sekunder, yaitu Data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan di tempat kumpulan informasi seperti perpustakaan, perkantoran, pusat statistik, kantor-kantor pemerintah dan sebagainya. Adapun sumber data skunder yang dimaksud yaitu tulisan dan dokumen seperti buku panduan Balai Penyuluh Kecamatan (BPK), Undang Undang yang terkait dengan Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dan dokumen-dokumen lainnya.

### **D. Metode Pegumpulan Data**

#### a. Observasi

Kegiatan obeservasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek, yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis harus melakukan obsevasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka penulis dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 224.

b. Teknik *Library Research*.

*Library Research*, yaitu melakukan penelitian di perpustakaan dan mengkaji buku dan literatur ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik penulisan yang digunakan yaitu:

- 1) Kutipan langsung: mengutip bahan referensi ke pustakaan tanpa merubah redaksi sedikitpun.
- 2) Kutipan tidak langsung : mengutip bahan referensi melalui perantara.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>5</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berupa kuesioner yang sebelumnya telah dirancang dalam instrumen penelitian.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan menggunakan teknik wawancara tak terstruktur (*Non Structured Interview*). Menurut Lexy J. Moleong wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang lebih bebas isirannya. Subjek penelitian biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifatnya yang khas. Biasanya mereka

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 185.

memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.<sup>6</sup>

Dengan wawancara ini, penulis dapat menghasilkan data sebanyak-banyaknya yang ingin diungkapkan dengan maksud untuk menggali, memperoleh informasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dan disiapkan, kemudian dikembangkan di lapangan dengan wawancara terbuka, dalam artian memberikan kesempatan pada subjek penelitian dan informan untuk mengembangkan jawaban pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Secara teknis juga diupayakan hubungan yang baik dan luwes antara pewawancara dengan informan agar pelaksanaan wawancara berjalan sesuai dengan harapan peneliti.

Teknik wawancara tidak terstruktur dan mendalam dilakukan untuk mengecek kebenaran data yang tidak terungkap dari hasil pengamatan, selain itu juga berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari *cross chek* untuk dijadikan bahan kajian bagi penelitian ini.

#### d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain-lain sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 191.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran penyuluh pertanian dalam lembaga Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) . Alat yang digunakan dalam dokumentasi penelitian ini adalah kamera untuk mengambil gambar (foto) aktivitas penyuluh pertanian dan mengambil gambar peneliti pada saat melakukan wawancara. Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang melengkapi atau mendukung data primer hasil wawancara dan pengamatan tentang tata Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu penelitian, dalam arti bahwa berhasil tidaknya suatu penelitian yang dilakukan itu tergantung dari bentuk instrumen yang dilakukan.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan sesuai dengan metode pengumpulan data :

1. Instrumen observasi adalah suatu instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

2. Instrumen Interview atau wawancara adalah salah satu tehnik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yang telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Dalam pelaksanaan interview ini penulis menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data-data seperti polpen, buku catatan, dan alat perekam.

3. Instrumen dokumentasi yaitu alat yang digunakan pada saat mengambil data atau dokumen yang sudah ada terkait dengan Peran Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Alat yang dimaksud yaitu kamera, flash disk, CD ROM dan sebagainya.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Metode analisis data adalah proses penyusunan dalam mengkategorikan data, mencari pola dengan maksud memahami maksudnya.<sup>7</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Analisis deskriptif itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> S. Nasution, *Metode Riset*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1998), h. 32.

### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari data-data di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yaitu suatu analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, serta mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir ditarik.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis dan serempak. Mulai dari proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsikan dan penyajian serta kesimpulan dan interpretasi semua informasi yang secara data serta secara selektif telah terkumpul.<sup>8</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif.

Dalam penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun dalam *life history* sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan secara naratif sesuai dengan pemaparan yang ditampilkan dalam pembahasan hasil penelitian.

### 3. Menarik Kesimpulan

Verifikasi/penarikan kesimpulan, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Dan

---

<sup>8</sup> Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 10-17.



kesimpulan-kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang ada.

### ***G. Pengujian Kabsah Data***

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu: nilai subyektivitas, metode pengumpulan dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subyektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: kredibilitas, transferabilitas dan konfirmitas.

#### **1. Kredibilitas**

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan member check.

#### **2. ransferabilitas**

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Supaya orang dapat memahami hasil penelitian ini sehingga ada kemungkinan untuk

menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka penelitian dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

### 3. Dependabilitas

Dependabilitas yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

### 4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

## **BAB IV**

### **PERANAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Letak Geografis**

Balai Penyuluhan Pertanian (BPK) Amali adalah salah satu BPK di kabupaten Bone yang terletak di sebelah barat Kota Watampone dengan luas wilayah  $\pm 11.913 \text{ Km}^2$  terdiri terdiri dari 14 desa, satu (1) kelurahan dan 45 dusun.

Jarak kantor BPK Amali dari ibu kota kabupaten  $\pm 38 \text{ km}$ , letak geografis dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan BPK Ajangale dan Dua BoccoE;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan BPK Tellu Siattinge dan Ulaweng;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan BPK Ulaweng;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Soppeng.

wilayah kerja Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali sangat bervariasi yakni :

- a) Datar 0 – 8 % : 3.885 Ha
- b) Landai 8 – 25 % : 3.744 Ha
- c) Bergelombang 25 – 45 % : 2.870 Ha

d) Berbukit 45 % ke atas : 1.121 Ha<sup>1</sup>

## 2. Visi, Misi, dan Strategi BPK

**Tabel 4.1**

Tabel Visi, Misi, Dan Strategi BPK

Visi	Misi	Strategi
Terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha yang berdaya, bermartabat, mandiri, dan sejahtera.	a) Memperkuat kapasitas modal manusia dan modal sosial pertanian; b) Membangun strategi kemitraan pemerintahan, masyarakat, dunia bisnis, dan akade misi; c) Mengembangkan keterpaduan system dalam penyuluhan pertanian d) Mengembangkan keberlanjutan system komunikasi dan inovasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan	1. Mengembangkan kelembagaan petani; 2. Menempatkan kelembagaan penyuluhan sebagai penggerak utama penyuluhan; 3. Meningkatkan nilai tambah produk melalui penguatan kelembagaan petani; 4. Membangun sistem cafetaria informasi agribisnis berbasis teknologi (Cyber Extension); 5. Mengembangkan peningkatan mutu dan daya saing produk dengan kembali ke alamiah; 6. Mengembangkan kemampuan penyuluh berbasis kompetensi melalui sertifikasi profesi; 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh melalui pelatihan; 8. Menerapkan sistem

<sup>1</sup> Lihat Profil Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali, Kabupaten Bone, 26 Mei 2017.

		<p>insentif di dalam pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan;</p> <p>9. Mengurangi ketergantungan sarprodi melalui pengembangan pembibitan dan saprodi lain dengan meningkatkan kapasitas petani;</p> <p>10. Meningkatkan komitmen pimpinan daerah terhadap penyuluhan dan harmonisasi hubungan kerja antar instansi terkait.</p>
--	--	--

*Sumber: Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali*

### **3. Kelembagaan**

#### **a. Kelembagaan Kelompok Tani**

Berdasarkan hasil rekapitulasi kelompok tani di Kecamatan Amali tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Tani Dewasa : 202 kelompok
- 2) Wanita Tani : 18 kelompok
- 3) Taruna Tani : 15 kelompok
- 4) Gapoktan : 15 kelompok
- 5) Jumlah Petani : 6.318 Orang

#### **b. Kelembagaan Petani**

Jumlah kelompok tani dari semua sub sektor yang ada sampai dengan Desember 2016 adalah 235 kelompok, sedangkan jumlah Gapoktan( Gabungan

Kelompok Tani ) sebanyak 15 kelompok, sudah identik dengan banyaknya Desa/ Kelurahan dalam wilayah kecamatan Amali.

c. Kelembagaan Penyuluhan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang SP3K, di Kabupaten Bone Bulan Maret 2011 telah terbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bone, sekaligus pembentukan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), sebanyak 27 unit, salah satunya adalah Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali.

d. Kelembagaan Ekonomi

Lembaga ekonomi yang tersedia dalam rangka menunjang pembangunan Pertanian di Kecamatan Amali adalah sebagai berikut :

- 1) KUD : 1 unit
- 2) KOPTAN : 4 unit
- 3) KIOS TANI : 6 unit
- 4) PASAR : 4 unit <sup>2</sup>

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan SK Bupati Bone Tahun 2013 tentang penempatan tenaga fungsional penyuluh dalam lingkup Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bone di Kecamatan Amali ditempatkan 6 orang dan 1 tenaga administrasi.

---

<sup>2</sup> Lihat Rencana Program Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali, Kabupaten Bone, 26 Mei 2017.

**Tabel 4.2**

Tenaga Fungsional Penyuluh dan Administrasi BPK Kecamatan Amali Tahun 2016.

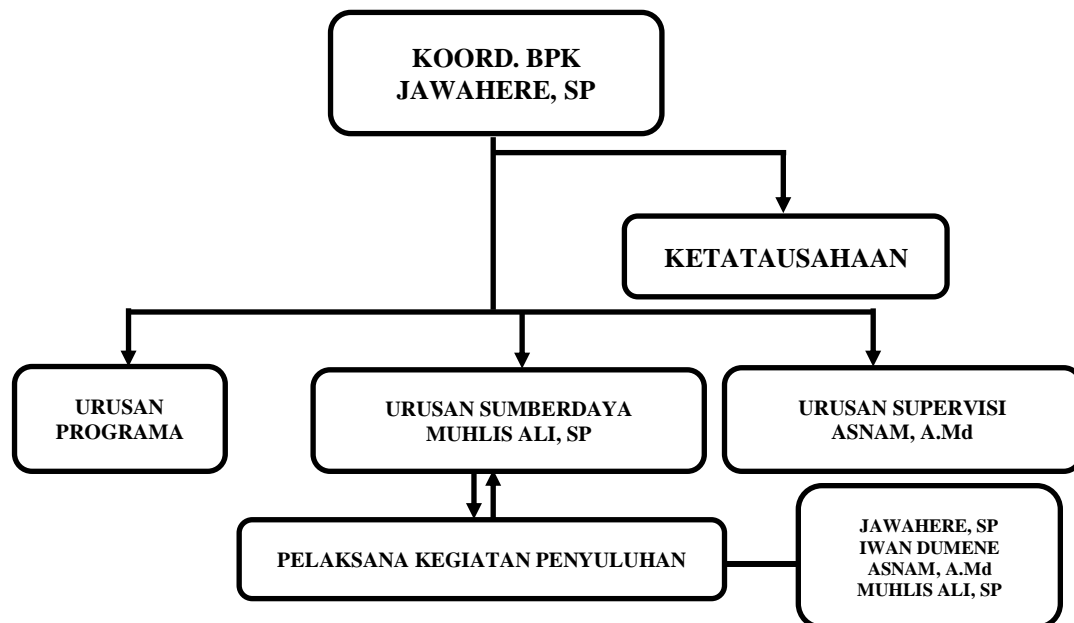
No	Nama Penyuluh	Satmingkal	Wilayah Kerja	Keterangan
1	JAWAHERE, SP NIP.19611202 198803 1 008	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Desa Ta'cipong, waempubbu, Lili Riattang	Koord/Pengelola BPK
2	IWAN DUMENE NIP.19640314 199303 1 010	Dinas Peternakan	Laponrong, Ajanglaleng, Wellulang dan Amali Riattang	PPK Peternakan
3	ASNAM, A.Md	Dinas Peternakan	Kel.Mampotu Waemputtange	THL Kontrak

*Sumber : Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali, Kabupaten Bone.*

## 5. Struktur Organisasi BPK Amali

**Bagan 4.1**

Struktur Organisasi Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Amali



*Sumber : Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali, Kabupaten Bone*

## **6. Peningkatan Kompetensi**

Badan Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertanian, tengah intensif mengkaji penyempurnaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), khusus untuk penyuluh pertanian.

Disamping itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuat Undang-Undang No.16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), kebijakan tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Kementerian Negara No. PER/02/MENPAN/2/2008 tentang jabatan penyuluhan pertanian dengan angka kreditnya.

Dengan demikian dengan adanya pelatihan-pelatihan dan program sertifikasi profesi diharapkan penyuluh bukan sekedar jabatan fungsional, akan tetapi juga profesi pendampingan dan pemberdaya petani yang memiliki akuntabilitas, responsibilitas, dan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>3</sup>

## **7. Program Kebijakan Pembangunan Pertanian Kecamatan Amali Tahun 2017**

Program kegiatan kebijakan pembangunan pertanian Kecamatan Amali mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

---

<sup>3</sup> Lihat Rencana Program Balai Penyuluhan Kecamatan, 26 Mei 2017.



**Tabel 4.3**

Program Kegiatan Kebijakan Pembangunan Pertanian Kecamatan Amali Tahun 2017

<b>No</b>	<b>Program Proyek</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kegiatan Prioritas</b>	<b>Biaya (Rp)</b>
1	Penyusunan Program dan Pelaporan	Tercapainya sasaran pembangunan Pertanian.	Belanja barang dan jasa	2.600.000
2	Peningkatan kinerja Penyuluhan pengelolaan Balai	Meningkatkan pengetahuan petani dalam mengadopsi teknologi	Belanja barang dan jasa	2.400.000
3	Prasarana untuk kelembagaan penyuluh	Prasarana kegiatan penyuluhan	Belanja operasional dan penyuluhan	4.000.000
4	Adopsi teknologi padi dan jagung	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani	Pembinaan kelompok tani dewasa	10.000.000
5	Pengemangan tanaman hortikultura 2 unit	Tersedianya sayur dan buah-buahan segar	Pembinaan dan pemanfaatan pekarangan Vaksinasi antraks dan flu burung	84.000.000 10.000.000
6	Pengembangan ternak besar dan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani	Pembinaan dan penyuluhan Sekolah Lapang/ pembinaan	50.000.000
7	Pengembangan tanaman perkebunan	Peningkatan kerja areal dan produktivitas	Pembinaan dan penyuluhan	50.000.000

8	Peningkatan SDM	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani	Sekolah Lapang/ pembinaan dan penyuluhan	45.000.000
9	Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani	Kelompok tani, wanita tani dan pemuda tani	Penilaian kelompok, revitalisasi	5.000.000
10	Pembinaan dan Pengembangan taruna tani-nelayan	Kelompok tani-taruna tani-nelayan	kelompok dan pembinaan poktan Pembinaan dan penyuluhan	1.000.000

*Sumber: Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali*

**B. Peran Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.**

Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali memiliki peran penting, yaitu sebagai kegiatan yang merupakan katalis, pendamping, perantara, dan penemu solusi bagi pembangunan pertanian khususnya di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali. Penyuluhan mampu meningkatkan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usahatani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakat (*better living*).

**1. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Sebagai Motivator/Pendorong**

Hal-hal yang dilakukan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali terkait keterlibatannya sebagai pendorong atau motivator adalah memberikan motivasi atau dorongan kepada petani untuk selalu memajukan usahatannya, mendorong petani

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan membentuk kelompok tani , mendorong petani untuk menciptakan sendiri teknologi usahatani atau berinovasi, dan mendorong petani untuk berwirausaha agar petani dapat mencapai tingkat kesejahteraannya. Sebagaimana Yang diungkapkan oleh salah satu informan yang bernama Sumardi (48 tahun).

“ Adanya BPK di kelompok tani saya bagus sekali karena sering ketemu sama kelompok tani,kegiatan-kegiatannya bagus, pernah diadakan pertemuan sama petani memberikan pelajaran kepada petani masalah pertanian”<sup>4</sup>

Analisis wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Aktif dalam meberikan dorongan kepada petani agar usaha pertanian di Kelurahan Mampotu meningkat, seperti diadakannya pertemuan-pertemuan antara BPK, Kelompok tani dan anggotanya (Petani), dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan masalah pertanian. Sama dengan yang diungkapkan oleh informan yang bernama jawahere, S.P (56 tahun).

“ Partisipasi masyarakat kalau kita adakan penyuluhan di kelurahan mampotu itu sangat mendukung sekali kemudian misalnya yang biasa kita lakukan disana adalah temu lapang ataukah temu bicara ataukah temu kelompok itu yang biasa kita lakukan” untuk melaksanakan kegiatan itu bahwasanya bagaimana cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tersebut seperti itu.”<sup>5</sup>

Dari pernyataan informan diatas, dapat di ketahui bahwa partisipasi masyarakat (petani) di kelurahan Mampotu sangat mendukung dalam mengadakan penyuluhan misalanya melakukan kegiatan temu lapang atau temu bicara antara BPK

---

<sup>4</sup> Sumardi (48 tahun), Ketua Kelompok Tani, *Wawancara*, Kelurahan Mampotu, 02 Junii 2017

<sup>5</sup> Jawahere, S.P (56 tahun), Kordinator BPK Amali, *Wawancara*, Kantor BPK, 26 Mei 2017.

dan Petani dengan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bertani agar hasil dari usaha bertani meningkat dan dapat mencapai tingkat kesejahteraan.

## **2. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai pendidik**

Berdasarkan pengamatan penulis, kegiatan penyuluhan tidak boleh lepas dari memandirikan petani. Menjadikan petani tidak mengalami ketergantungan, petani dapat mengusahakan sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada dan memiliki inisiatif serta kreatifitas sehingga bisa mengembangkan apa yang telah disuluhkan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat tersebut. Selanjutnya usaha tersebut diharapkan dapat berkembang mencapai skala ekonomis dan mampu untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Semua kegiatan tersebut akan menimbulkan efek yang besar bagi kesejahteraan masyarakat serta pendapatan masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung akan membantu pembangunan di daerah tersebut.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan yang bernama Jawahere, S.P (64 tahun).

“Salah satu meningkatkan pendapatan masyarakat petani di kelurahan mampotu itu yang pertama yaitu membuat percontohan yang kedua itu meningkatkan SDM masyarakat dalam hal melalui sekolah lapang seperti itu merubah pola pikir masyarakat di Kelurahan tersebut.”<sup>6</sup>

Di ungkapkan pula oleh informan Sumardi

---

<sup>6</sup> Jawahere, S.P (56 tahun), Kordinator BPK Amali, *Wawancara*, Kantor BPK. 26 Mei 2017.

“Keberadaan BPK sangat bagus karena tanpa penyuluhan petani belum bisa melakukan pola tanam sesuai dengan hasil yang yang diharapkan. BPK pernah mengadakan SP (Sekolah Lapang).”<sup>7</sup>

Dari pernyataan kedua informan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu cara Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) untuk meningkatkan pendapatan petani di Kelurahan Mampotu yaitu yang pertama membuat lahan percontohan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program Sekolah Lapang (SL). Di Sekolah Lapang ini petani bisa belajar tentang tata cara bertani dengan baik sehingga hasil usaha tani meningkat dan menjadikan petani yang mandiri. Untuk mengikuti Sekolah Lapang tersebut petani harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani.

### **3. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai Fasilitator**

Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai fasilitator yaitu, pemberi kemudahan sarana dan prasarana, sebagai pemberi informasi dan sebagai jembatan penghubung inovasi baru kepetani. Keberhasilan petani dalam usahatani memerlukan cara-cara pengelolaan yang tepat dan benar agar menunjang perolehan hasil usaha tani yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Dirham (33 tahun).

“Selama rekeng biasa engka peran dari BPK kan sering diadakan penyuluhan kita bisa belajar disitu makkeda oddinni, selama rekeng diterpakan yarodo

---

<sup>7</sup> Sumardi (48 tahun), Ketua Kelompok Tani, *Wawancara*, Kelurahan Mampotu. 02 Juni 2017

pura napaggurukkie engka mua perubahan sebelumnya yala sukunye meninka-ningkama wasselena”<sup>8</sup>

Terjemahnya :

“Selama ada peran dari BPK, kan sering di adakan penyuluhan kita bisa belajar distu, jadi bisami selama kita terapkan yang pernah di ajarkan sudah ada perubahan sebelumnya dan sudah meningkat hasilnya”

Dari pernyataan informan di atas, dapat diketahui bahwa adanya Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) yang memberikan inovasi atau ide baru kepada petani, sehingga hasil pertanian di Kelurahan Mampotu sudah ada peningkatan.

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pertanian di wilayah kecamatan Amali terkhususnya di Kelurahan Mampotu tidak cukup hanya mengandalkan potensi alamnya saja tetapi harus ditunjang juga dengan manajemen keorganisasian diantara petani serta adanya fasilitas alat dan mesin pertanian (Alsinta) untuk mendukung kegiatan teknis di lapangan.

**Tabel 4.4**

Fasilitas usaha tani kecamatan Amali

No	Jenis fasilitas usahatani	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Kios saprotan	4	
2	Handseprayer	2.286	
3	Power Tresher Padi ( perontok padi)	75	
4	Power Tresher jagung ( perontok jagung)	91	
5	Traktor	22	

---

<sup>8</sup> Dirham (33 tahun), Petani, *Wawancara*, Kelurahan Mampotu, 06 Juni 2017.

6	Pompa air	12	
7	Cangkul	1.377	
8	Sabit	4.234	
9	Mesin pengering jagung	1	Belum berfungsi
10	UPH( Pengelolaan Hasil Kakao)	1	
11	Pengelolaan Limbah Kakao/ kompas	1	Belum berfungsi
12	Pengelolaan Biji Kakao	1	Belum berfungsi
13	Sumur Bor	2	Unit
14	Penggilingan Padi	47	
15	Industri RT Kerajinan Tangan	12	
16	Mobil Pengangkut saprodi dan hasil pertanian ( dompeng)	132	
17	Industri Gula Merah	31	
18	Traktor 4 Roda	1	Unit

*Sumber: Balai Penyuluhan Kecamatan BPK Amali*

Seperti yang di ungkapkan oleh informan yang bernama Sumardi

“Kalau petani disini diberikan bibit, jalan tani ada juga traktor, dan pengipit jagung”<sup>9</sup>

Sperti pula yang di ungkapkan oleh informan yang bernama Hidding (49 tanun).

“Petani disini sering diberikan alat pertanian seperti traktor, penggiling jangung dan msih banyak yang lainnya”<sup>10</sup>

Dari pernyataan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa petani di berikan fasilitas berupa alat pertanian yang diperlukan oleh petani kepada Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) melalui ketua kelompok tani. Untuk mendapatkan bantuan-bantuan pertanian tersebut masyarakat harus terdaptar sebagai anggota kelompok tani

---

<sup>9</sup> Sumardi (48 tahun), Ketua Kelompok Tani, *Wawancara*, Kelurahan Mampotu. 02 Juni 2017.

<sup>10</sup> Hiding (49 tahun), Ketua Kelompok Tani, *Wawancara*, Kelurahan Mampotu, 05 Juni 2017.

di Kelurahan Mampotu. Dengan adanya bantuan berupa alat pertanian, aktifitas bertani di Kelurahan Mampotu semakin muda dan petani tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak untuk bertani.

#### **4. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai Agen Perubahan**

Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai agen perubahan, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) di kelurahan Mampotu Kecamatan Amali senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah dirinya ke arah kemajuan. Dalam hal ini Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali berperan sebagai katalis, pembantu memecahkan masalah (*solution gives*), pembantu proses (*process helper*), dan sebagai sumber penghubung (*resources linker*). Untuk mewujudkan hal tersebut maka Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) harus terlibat sebagai berikut:

- a. Balai Penyuluhan (BPK) harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat. Kehadiran Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.
- b. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasarannya.



- c. Penyuluhan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Sumartono (44 tahun).

“Alhamdulillah adanya BPK cukup membantu para petani karena, petani dulu khususnya dibidang hama, dan penyakit. Dulu masyarakat tidak tahu kalau ada ditemukan hama langsung saja disemprot pestisida padahal itu penyakit tidak natau karena belum ada pencerahan, sekalnya ada BPK masyarakat bisa tahu baik cara-cara menanam Alhamdulillah baik pola tanam, cara bertani natau semua, Alhamdulillah membantu para petani”<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat di pahami bahwa Sebelum adanya Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) para petani di Kelurahan Mampotu kecamatan amali Belum tahu sistem bertani dengan baik sehingga para petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali memiliki banyak masalah dengan hasil pertaniannya. Namun, setelah adanya Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai agen perubahan petani sudah bisa malakukan kegiatan bertani dengan baik tanpa ada masalah.

***C. Keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone***

Penyuluhan Pertanian adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua

---

<sup>11</sup> Sumartono (44 tahun), Petani, *Wawancara*, Kelurahan Mampotu, 05 Juni 2017.

stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan informan yang bernama Amirdin, S.Pt, M.Si (44 tahun).

“ BPK selalu bekerja sama dengan kita selaku pemerintah setempat, apabila dalam penentuan rencana kerja petani (RKP) misalnya penentuan RDKK itu harus bekerja sama dengan pemerintah setempat apa kebutuhan mereka kemudian pada musim tanamnya kapan jadi, selalu kita menentukan itu. Jadi dalam hal ini untuk mendapatkan bantuan kepada petani, harus ada kerjasama antara BPK dan kita sebagai pemerintah setempat”<sup>12</sup>

Dari ungkapan informan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah Kelurahan Mampotu selalu bekerjasama dalam menentukan suatu hal, baik penentuan musim tanam maupun bantuan-bantuan yang diberikan petani oleh pemerintah daerah dalam halnya dinas pertanian.

Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) tentu saja tidak sepatasnya untuk mengharapkan “peranan yang menentukan” dalam menerapkan peraturan karena dengan mengambil keputusan, penyuluh akan kehilangan kepercayaan dari petani sehingga menyebabkan peranan agen penyuluhan menjadi tidak efektif. Organisasi penyuluhan hanya dapat memainkan peranan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah apabila memiliki kaitan erat dengan pembuat kebijakan dan pelaku-pelaku lain yang terlibat. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Amirdin, S.Pt, M.Si (44 tahun)

---

<sup>12</sup> Amirdin, S.Pt, M.Si (44 tahun), Kepala Kelurahan Mampotu, *Wawancara*, Kantor Kelurahan Mampotu, 30 Mei 2017.

“Setiap tahun itu kita dalam menyusun rencana kerja dalam hal ini ketentuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang biasa disebut musrembang di tingkat kelurahan selalu kita mengundang juga dari BPK ini untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita semua termasuk kelompok tani, bantuan-bantuan apa yang bisa diberikan kepetani, kemudian petani juga bisa mengutarakan kebutuhannya supaya bisa ketemu, karena biasa juga itu kelompok tani mengusulkan kebutuhannya ternyata di Dinas pertanian itu tidak ada untuk itu jadi petani harus juga tahu apa yang disediakan di dinas pertanian dalam hal ini BPK yang bisa memberikan informasi kepada kita kemudian pa kebutuhannya petani. Jadi selalu setiap tahun kita menjadikan sebuah dokumen dalam RKP Kelurahan dalam ketentuan musrembang kelurahan”<sup>13</sup>

Dari ungkapan informan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah Kelurahan Mampotu selalu melibatkan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam kegiatan Musyawarah Pembangunan (MUSREMBANG) untuk memberikan penjelasan kepada petani tentang masalah pertanian dan petanipun bisa mengutarakan kebutuhan pertanian yang diperlukan. Dalam kegiatan ini Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dapat menetapkan keputusan bersama petani tentang perencanaan pembangunan pertanian selanjutnya.

Dari semua ungkapan informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sangat terlibat dalam peningkatan pembangunan pertanian di Kelurahan Mampotu maupun dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu.

---

<sup>13</sup> Amirdin, S.Pt, M.Si (44 tahun), Kepala Kelurahan Mampotu, *Wawancara*, Kantor Kelurahan Mampotu., 30 Mei 2017.

***D. Penunjang Dan Penghambat Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.***

**1. Faktor Penunjang**

Faktor penunjang atau pendukung Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang utama yaitu kebijaksanaan dari pemerintah berupa program maupun bantuan-bantuan modal misalkan dana PUAP, Berdasarkan Pedoman Umum PUAP salah satu program kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan mewujudkan kesejahteraan petani adalah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Kegiatan PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal kelompok tani yang selanjutnya akan diberikan kepada petani anggota, sebagai bantuan modal dalam kegiatan usaha pertanian. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Muhlis Ali, S.P (47 tahun).

“Faktor yang mendorong dalam peningkatan kesejahteraan petani yaitu dengan kebijakan pemerintah seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pemerintah memberikan modal Untuk usaha tani kita bisa memberikan modal kepada petani untuk mengembangkan usaha taninya”<sup>14</sup>

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, yang menjadi faktor pendorong Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone yaitu

---

<sup>14</sup> Muhlis Ali (47 tahun), Penyuluh Pertanian, *Wawancara*, Kelurahan Mampotu, 06 Juni 2017.

dengan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) petani diberikan modal untuk usaha Agribisnis kepada pemerintah daerah sebagai penambah penghasilan sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang tidak hanya bergantung pada hasil pertaniannya. Dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Balai Penyuluhan Kecamatan memberikan kepercayaan kepada ketua kelompok tani untuk mengusulkan anggota kelompok tani yang berhak mendapatkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tersebut. Di kelurahan Mampotu terdiri dari 6 kelompok tani, dan semua ketua kelompok tani berhak mengusulkan anggotanya untuk mendapatkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Dan salah satu petani di Kelurahan mampotu diberikan modal berupa mesin penggiling pembuatan pupuk kompos yang sampai sekarang berjalan dengan lancar.

Faktor pendorong atau pendukung selanjutnya yaitu pelatihan-pelatihan kepada pengurus kelompok tani untuk semakin meningkatkan kualitas SDM pengurus, serta adanya penyuluhan-penyuluhan pertanian juga merupakan faktor pendukung dalam pengembangan karena dengan adanya penyuluhan pertanian pengetahuan petani dan kelompoknya semakin bertambah dan berwawasan luas, sehingga mendukung pengembangan kelompok tani Maju ke depan. Faktor pendorong atau pendukung sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian, karena memberikan motivasi bagi pengurus dan anggota Kelompok Tani sehingga lebih berkembang dari sebelumnya, selain itu dengan adanya faktor-faktor tersebut kualitas

SDM Kelompok Tani semakin maju, permodalan semakin membaik dan dapat untuk mengembangkan unit usaha yang lebih luas. Hal tersebut seperti yang diungkapkan informan yang bernama Jawahere S.P (56 tahun).

“Kami selalu adakan pertemuan kepada Kelompok Tani seperti temu bicara untuk membahas masalah pertanian di daerahnya tersebut”<sup>15</sup>

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) selalu mengadakan pertemuan kepada semua Kelompok Tani di Kelurahan Mampotu dengan kata lain temu bicara untuk membahas perkembangan pertanian di daerah Kelurahan Mampotu tersebut.

## **2. Faktor Penghambat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada satu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupannya sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri maupun ataupun dari luar manusia.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi faktor penghambat Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone yaitu:

---

<sup>15</sup> Jawahere, S.P (56 tahun), Kordinator BPK Amali, *Wawancara*, Kantor BPK. 26 Mei 2017.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 385.

a. Kurangnya Tenaga penyuluh

Petani merupakan produsen pangan bagi masyarakat dan Negara terkhususnya di Kelurahan Mampotu, meskipun dengan kebijakan pemerintah dalam mensejahterahkan petani melalui Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sudah berjalan, faktanya masih ada petani di Kelurahan Mampotu yang blum dapat mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Hal itu akibat kurangnya pengetahuan petani yang dibiarkan berlarut-larut dalam menghadapi berbagai masalah dalam menjalani usaha tani. Jangankan untuk menjual hasil panennya ke pasar demi mencukupi kebutuhan hidup lainnya, hasil panen untuk dikonsumsi sendiri pun tidak dapat dipanen oleh petani. Kondisi tersebut juga diperparah oleh adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini. Pada kenyataannya, masih banyak petani yang tidak mengetahui tentang dampak dari perubahan iklim dan mundurnya waktu tanam sehingga mereka mengalami gagal panen, akibat kekeringan yang berkepanjangan dan pola tanam yang tidak serentak. Dampak lainnya, serangan hama merebak begitu hebatnya, dan kembali lagi petani tidak tahu bagaimana harus mengatasi masalah tersebut dengan sesegera mungkin. Seharusnya petani mendapatkan bimbingan dari para penyuluh pertanian. Kenyataan di lapangan, jumlah penyuluh pertanian semakin lama makin berkurang dan makin tidak sebanding dengan banyaknya desa dan jumlah petani. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Jawahere, S.P (56 tahun).

“Masih banyak kegiatan yang belum terlaksana di kelurahan tersebut karena keterbatasan penyuluh, di Kecamatan Amali hanya terdiri dari dua (2) orang penyuluh untuk menangani lima belas (15) Desa/Kelurahan.”<sup>17</sup>

Dari ungkapan informan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak kegiatan atau program Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) belum terlaksana di Kelurahan Mampotu dikarenakan terbatasnya penyuluh yang hanya terdiri dari dua (2) orang yang harus menangani satu (1) Kecamatan yang terdiri dari lima belas (15) Desa/Kelurahan.

Hal itu tentunya tidak terlepas dari kesalahan pemerintah saat ini dalam mengatur strategi serta merekrut para penyuluh di bidang pertanian. Bahkan, keberadaan penyuluh pertanian di era rezim Suharto pada kenyataannya jauh lebih baik dibandingkan era pascareformasi,. Parahnya, dalam perjalanannya penyuluh banyak yang dipolitisasi, dengan hanya ditempatkan pada wilayah/daerah-daerah konstituen dari rezim yang tengah memerintah..

b. Penyaluran prasarana pertanian mengalami Keterlambatan

Salah satu penunjang utama dalam pertanian adalah prasarana. Naman di Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) menjadi kendala dalam melaksanakan program pertanian di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, seperti yang diungkapkan oleh informan Jawaeh, S.P (56 tahun).

“Penyaluran prsarana biasa terjadi keterlambatan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi

---

<sup>17</sup> Jawaeh, S.P (56 tahun), Kordinator BPK Amali, *Wawancara*, Kantor BPK.



mudah-mudahan kedepan ini bisa tersedia sebelum pelaksanaan kegiatan agar kita bisa meningkatkan hasil pendapatan masyarakat”<sup>18</sup>

Dari pernyataan informan diatas dapat di simpulkan bahwa dengan keterlambatan penyaluran prasarana pertanian kegiatan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) yang dilaksanakan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di ungkapkan pula oleh informan yang bernama Musa (49 tahun)

“Yang menjadi keluhan petani, sering kita dijanji bantuan contoh bantuan bibit sudah diterapkan di anggota bahwa musim tanam ini akan ada bantuan ternyata nanti setelah masyarakat tidak sabar menunggu nanti sudah tanam bibitnya baru datang”<sup>19</sup>

Dari ungkapan informan diatas penulis dapat memahami bahwa yang menjadi keluhan petani di Kelurahan Mampotu yaitu terlambatnya prasarana pertanian seperti kurangnya bantuan bibit yang menjadi indikator terpenting bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, dari hasil pengamatan penulis, maka penulis mengharapkan adanya suatu keprihatinan pemerintah setempat agar tercipta hubungan harmonis antara masyarakat petani, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan kepala kelurahan agar bersama-sama meningkatkan hasil pertanian guna meningkatkan kesejahteraan sosial di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Selain itu, agar kesejahteraan sosial dapat terwujud, upaya yang telah ada perlu ditingkatkan agar terjadi sinkronisasi antara jumlah petani di Kelurahan Mampotu dengan tingkat kesejahteraan social petani.

---

<sup>18</sup> Jawahere, S.P (56 tahun), Kordinator BPK Amali, *Wawancara*, Kantor BPK. 26 Mei 2017.

<sup>19</sup> Musa (49 tahun), Petani, *Wawancara*, Kelurahan Mampotu., 02 Juni 2017.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. *Pertama*, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Sebagai Motivator/Pendorong. *Kedua*, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai pendidik. *Ketiga*, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai Fasilitator. *Keempat*, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai Agen Perubahan.

2. Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, sangat terlibat dalam peningkatan pembangunan pertanian di Kelurahan Mampotu maupun dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu.

3. Penunjang Dan Penghambat Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. *Pertama*, faktor penunjang, Faktor penunjang atau pendukung Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang utama yaitu kebijaksanaan dari pemerintah berupa program maupun bantuan-bantuan modal

misalkan dana PUAP. Kegiatan PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal kelompok tani yang selanjutnya akan diberikan kepada petani anggota, *Kedua*, faktor penghambat, yaitu Kurangnya Tenaga penyuluh dan Penyaluran prasarana pertanian mengalami Keterlambatan.

### **B. Implikasi**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas terdapat beberapa implikasi penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan keterlibatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dalam rangka peningkatan kapasitas petani yang ada di Kelurahan Mampotu agar hasil pertanian dapat lebih banyak dan lebih menjanjikan.
2. Perlunya pemahaman dari petani dan pihak Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) yang ada di Kecamatan terhadap peningkatan kesadaran bagi petani dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Kelurahan Mampotu.
3. Mengusulkan hal-hal yang prioritas dan utama sesuai dengan daftar kebutuhan bukan daftar keinginan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi:

- Adi Rukminto Isbandi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan I 2013.
- Badan Pusat Statistic, *Lapangan Pekerjaan Utama Rakyat Indonesia 2013 –2014*, Jakarta: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2013 dan 2014.
- Buku Pintar Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian di BPK, tth.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, tth.
- Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial, Cetakan II*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hardiansyah, *Komunikasi Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi* Cetakan 1, 2015.
- Himawan Muammar, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bahasa Indonesia 1998.
- Loekman Sutrisno, *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Mardikanto, *Sistem Penyuluhan Pertanian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Cetakan II 2009.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: GP Press Group, 2013.
- Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Miles Matthew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, Yogyakarta: Media Wacana, 2007.

Nasution, *Metode Riset*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1998.

Piotr, Sztompka *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cetakan 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Qardhawi Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insan Press 1995.

Sunarti, dkk., *Masyarakat Petani, Mata Pencarian Sambilan dan Kesempatan kerja di Kelurahan Cakung Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* 1990.

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan II 2005

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Sjafari Agus, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syamsuddin , *Benang-benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*, Cetakan 1, Jawa Timur : Wade 2017

Sumadiria Haris, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014.

Salikin A Karwan, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Syamsuddin, *Paradigma Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*, Makassar: Shofia, 2016.

Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pertanian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995.

Wibawa Dian Winny, *Podoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluh Kecamatan (BPK)*, Jakarta: Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2014.

Yuli Prasetya , *Marginalisasi Petani dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian*, Yogyakarta: UGM, 2011.

**Referensi Online:**

[Http//.bpppataruman.blogspot.com/2013/09/balai-penyuluhan-pertanian.html](http://.bpppataruman.blogspot.com/2013/09/balai-penyuluhan-pertanian.html) (Disper  
5 Sep 2013)

Warsana, SP, Strategi Melakukan Penyuluhan Pertanian untuk Petani “Kecil”,  
[http://www.google.com/url?q=http://www.litbang.deptan.go.id/artikel/one/20](http://www.google.com/url?q=http://www.litbang.deptan.go.id/artikel/one/202/pdf/Strategi%2520)  
[2/pdf/Strategi%2520](http://www.litbang.deptan.go.id/artikel/one/202/pdf/Strategi%2520), 2008

## LAMPIRAN PETA



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(Kepala/Penyuluh di Balai Penyuluhan Kecamatan)**

**1. Identitas Informan**

Nama :

TTL :

Profesi :

Alamat :

Pendidikan :

**2. Pertanyaan Peneliti**

- Bagaimana pandangan bpk tentang hasil pertanian para petani di Kelurahan Mampotu?
- Langkah-langkah strategis apa yang telah dilakukan oleh BPK untuk membantu meningkatkan penghasilan petani?
- Apa saja program dari BPK yang sudah terlaksana Maupun Belum terlaksana?
- Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh BPK dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang pertanian untuk masyarakat?
- Apa yang menjadi factor pendorong dalam melakukan kegiatan penyuluhan?
- Bagaimna tingkat partisipasi masyarakat ketika dilakukan penyuluhan dari BPK?



## **PEDOMAN WAWANCARA (Pemerintah Kelurahan)**

### **1. Identitas Informan**

Nama :

TTL :

Profesi :

Alamat :

Pendidikan :

### **2. Pertanyaan Peneliti**

- Bagaimana relasi antara BPK dan pemerintah setempat untuk meningkatkan hasil produksi petani?
- Apakah dalam RKP Kelurahan telah memuat tentang rencana peningkatan mutu hasil produksi petani?
- Program apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam sektor pertanian?

## **PEDOMAN WAWANCARA (Masyarakat (Petani))**

### **1. Identitas Informan**

Nama :

TTL :

Profesi :

Alamat :

Pendidikan :

### **2. Pertanyaan Peneliti**

- Bagaimana hasil pertanian bpk/ibu selama musim panen?
- Apakah hasil pertanian bpk/ibu sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari?
- Bagaimana pandangan bpk/ibu tentang peran dari BPK?
- Apakah bpk/ibu merasakan dampak dari keberadaan BPK dikelurahan ini?
- Apakah bpk/ibu pernah menerima bantuan pertanian dari pemerintah?
- Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh BPK untuk para petani?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(Ketua Kelompok Petani)**

**2. Identitas Informan**

Nama :

TTL :

Profesi :

Alamat :

Pendidikan :

**3. Pertanyaan Peneliti**

- Bagaimana pendapat bapak tentang kinerja BPK di kelurahan Mampotu?
- Kegiatan apa yang pernah di laksanakan BPK di kelompok Tani bapak?
- Apakah sering di adakan kegiatan penyuluhan di kelompok tani bapak?
- Apa-apa saja bantuan yang diberikan pemerintah kepada para petani?
- Apakah ada syarat bagi petani untuk menerima bantuan dari pemerintah?

## **DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN**



**Gambar 1. Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Amali**



**Gambar2. Kantor Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali**



**Gambar 3. Wawancara dengan Kordinator BPK Amali An. Jawahere**



**Gambar 4 . Wawancara dengan Kepala Kelurahan Mampotu An. Amirdi, S.Pt, M.Si (44 tahun)**





**Gambar 5. Wawancara dengan petani An. Musa (47 tahun)**



**Gambar 6. Wawancara dengan ketua kelompok tani An. Hidding (49 tahun)**



**Gambar 7. Wawancara dengan petani An. Dirham (33 tahun)**



**Gambar 8. Wawancara dengan ketua kelompok tani An. Sumardi (49 tahun)**





**Gambar 9. Wawancara dengan petani An.Sumartono (49 tahun)**



**Gambar 10. Kegiatan Penyuluhan**





**Gambar 10. Lokasi kegiatan Temu Lapang**



**Gambar 11. Hasil pertanian**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

*Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☐ (0411) 864924, Fax, 864923 Makassar  
Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo ☐ (0411) 841879, Fax, 8221400 Samata-Gowa*

Nomor : B-5107/DU.I/PP.01.1/10/2017  
2017

Samata Gowa, 08 November

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : *Undangan Ujian Munaqasyah*

Kepada Yth.

1. Ketua, Sekretaris dan Pelaksana
  2. Pembimbing I dan II
  3. Para Penguji Ujian Munaqasyah I dan II
- Di-  
Tempat

*Assalam Alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah Skripsi saudara An. **Irhamasyah** Nim: 50300113013 Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial dengan judul: Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri ujian tersebut, yang Insya Allah pada:

*Hari/Tanggal : Jum'at, 10 November 2017*

*Waktu : 09.30- Selesai*

*Tempat : Ruang Rapat Dekan LT II Fak. Dakwah dan Komunikasi*

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

**Dr. H. Mubahuddin, M.Ag**  
NIP. 19701208 200003 1 001



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor : 2494 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan tanggal 08 November 2017 perihal : Ujian Munaqasyah a.n. Irhamsyah. NIM. 50300113013 Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial dengan judul skripsi: *Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone*
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu membentuk panitia, pembimbing dan penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam penetapan Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai panitia, pembimbing dan penguji.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.  
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 260.A tahun 2016 tentang Kalender Akademik tahun 2016/2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia, Pembimbing dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- |               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Ketua         | : Dra. St. Aisyah BM., M.Sos. I |
| Sekretaris    | : Dr. Sakaruddin, S.Sos., M.Si  |
| Pembimbing I  | : Dr. H. Mahmuddin, M.Ag        |
| Pembimbing II | : Dr Syamsuddin AB, S.Ag., M.Pd |
| Penguji I     | : Dr. H. Baharuddin Ali, M.Ag   |
| Penguji II    | : Drs. H. Syakhrudin DN, M.Si   |
| Pelaksana     | : Suharyadi, SH.I               |
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Nomor 025.04.2.307314/2017 tanggal 07 Desember 2016 tahun anggaran 2017
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 08 November 2017

Dekan,

  
Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.  
NIP. 196908271996031004

Tembusan  
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor : 781 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan tanggal 27 April 2017 perihal : Ujian Proposal Skripsi a.n. Irhamsyah NIM. 50300113013 Jurusan. PMI/Kesejahteraan Sosial dengan judul skripsi : *Peran Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mapotu Kecamatan Amalia Kabupaten Bone*
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Proposal Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu membentuk panitia, pembimbing dan penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam penetapan Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai panitia, pembimbing dan penguji.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.  
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 260.A tahun 2016 tentang Kalender Akademik tahun 2016/2017.

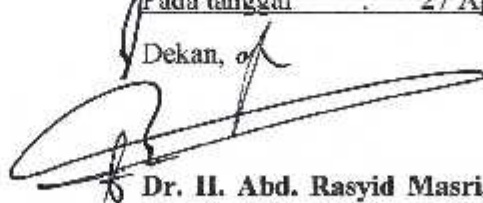
**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia, Pembimbing dan Penguji Ujian Proposal Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- |               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Ketua         | : Dra. St. Aisyah BM., M.Sos. I  |
| Sekretaris    | : Dr. Sakaruddin, M.Si           |
| Pembimbing I  | : Dr. H. Mahmuddin, M.Ag         |
| Pembimbing II | : Dr. Syamsuddin AB, S.Ag., M.Pd |
| Penguji I     | : Dr. H. Baharuddin Ali, M.Ag    |
| Penguji II    | : Drs. H. Syahrudin DN, M.Si     |
| Pelaksana     | : Suharyadi, Sh.I                |
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Proposal Skripsi
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPAUIN Alauddin Makassar Nomor 025.04.2.307314/2017 tanggal 07 Desember 2016 tahun ahun anggaran 2017
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 27 April 2017

Dekan,



**Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.**  
NIP. 196908271996031004

Tembusan  
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor : 2407 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan tanggal 31 Oktober 2017 perihal : Ujian Hasil Penelitian Skripsi a.n. **Irhamisyah NIM. 50300113013** Jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial dengan judul skripsi : **"Peran Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mapotu Kecamatan Amalia Kabupaten Bone"**
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Hasil Penelitian Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu membentuk panitia, pembimbing dan penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam penetapan Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai panitia, pembimbing dan penguji.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.  
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 260.A tahun 2016 tentang Kalender Akademik tahun 2016/2017.

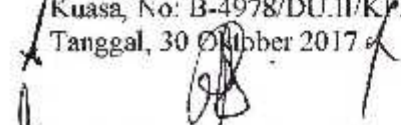
**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia, Pembimbing dan Penguji Ujian Hasil Penelitian Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- |               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Ketua         | : Dra. St. Aisyah BM., M.Sos. I  |
| Sekretaris    | : Dr. Sakaruddin, M.Si           |
| Pembimbing I  | : Dr. H. Mahmuddin, M.Ag         |
| Pembimbing II | : Dr. Syamsuddin AB, S.Ag., M.Pd |
| Penguji I     | : Dr. H. Baharuddin Ali, M.Ag    |
| Penguji II    | : Drs. H. Syahrudin DN, M.Si     |
| Pelaksana     | : Suharyadi, Sh.I                |
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Hasil Penelitian Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPAUIN Alauddin Makassar Nomor 025.04.2.307314/2017 tanggal 07 Desember 2016 tahun anggaran 2017  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 31 Oktober 2017

Dekan,  
Kuasa, No: B-4978/DU.II/KP.07.6/10/2017  
Tanggal, 30 Oktober 2017

  
Dr. H. Mahmuddin, M.Ag  
NIP. 19621217 198803 1 003

Tembusan  
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 7 0 1 4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6874/S.01P/P2T/05/2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Bupati Bone

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Nomor : B.2463/DU.I/TL.00/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **IRHAMSYAH**  
Nomor Pokok : 50300113013  
Program Studi : PMI-Kessos  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PERANAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Mei s/d 24 Juni 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar **dipergunakan** sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 19 Mei 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.







**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/12.495/V/II/DP/DP/PTSP/2017

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

**N a m a** : **IRHAMSYAH**  
**NIP/Nim/Nomor Pokok** : 503001130113  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Alamat** : Lingk. Taretta Kel. Mampoto Kec. Amali  
**Pekerjaan** : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**" PERANAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN PETANI DI KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI  
KABUPATEN BONE"**

Lamanya Penelitian : 23 Mei 2017 s/d 24 Juni 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala BPK Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23 Mei 2017



**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip. : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bone di Watampone
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone
5. Kepala BPK Kec. Amali di Amali
6. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ■ (0411) 864924. Fax. 864923 Makassar  
Kampus II : Jl. H. Yasin Limpo ■ (0411) 841879. Fax. 8221400 Samata-Gowa

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan mengoreksi seluruh isi skripsi mahasiswa an. Irhamsyah NIM. 50300113013 dengan judul “Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone” .Maka dengan ini kami menyatakan layak untuk diajukan ke *Seminar Hasil*

Pembimbing I

Dr. H. Mahmuddin, M.Ag  
NIP. 19621217 198803 1 003

Pembimbing II

Dr. Syamsuddin AB., S.Ag., M.Pd  
NIP. 1973410200212 1 004

Mengetahui  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dr. H. Misbahuddin, M.Ag  
NIP. 19701208 200003 1 001

---

**FDK BERMARTABAT**



## RIWAYAT PENULIS



Nama Lengkap Irhamsyah akrab dipanggil Irham lahir di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tanggal 25 November 1995. Anak kedua dari Pasangan Suami Istri, Arifin dengan Nurtang. Pendidikan formal yang pernah ditempuh, antara lain SDN 124 Mampotu pada tahun 2001 dan Lulus pada tahun 2007. Pada saat penulis duduk dibangku kelas 4, penulis masuk salah satu organisasi sekolah yaitu Pramuka dan pada saat kelas 6 SD penulis mengikuti gerak jalan dan mendapat juara I pada tingkat kecamatan. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS YAPIT Taretta pada tahun 2007. Pada saat duduk dibangku kelas VII penulis memasuki organisasi Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR) dan lulus pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA YAPIT Taretta dan lulus pada tahun 2013. Selama Sekolah di Madrasah penulis aktif di organisasi intra maupun ekstra kurikuler sebagai Anggota Palang Merah Remaja (PMR), Pengurus Pramuka dan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Pada tahun yang sama, anak kedua dari empat bersaudara ini melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi Kesejahteraan Sosial.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis aktif di Organisasi intra maupun ekstra. Organisasi Intra yang pernah diikuti dalam kampus menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial sedangkan Organisasi Ekstra yang diikuti yaitu Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HIMABIM) Uin Alauddin Makassar, Kader Kerukunan Mahasiswa Bone (KMB) Lapareppa dan menjadi anggota TAGANA Kompi UIN Alauddin Makassar. Untuk Memperoleh gelar sarjana sosial penulis menulis skripsi ini dengan judul “Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone”